

## ANALISIS TINGKAT DAYA SERAP ANGGARAN BELANJA DAERAH DI KOTA MALANG

Luluk Krisdiyanawati<sup>a\*</sup>, M. Faisal Abdullah<sup>b</sup>, Yunan Syaifullah<sup>c</sup>

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Corresponding author: lulukkrisdiyanawati@gmail.com

---

### Artikel Info

#### Article history:

Received 23 March 2020

Revised 20 April 2020

Accepted 14 Juni 2020

Available online 14 July 2020

---

**Keywords:** Absorption, Budget, Planning, Procurement of Goods and Services, Human Resources..

#### JEL Classification

B22, R11, R28, R58, Z18.

---

### Abstrak

*The purpose of this research is to understand the level of absorptive capacity of regional expenditure budgets in Malang City and to understand the effect of planning variables, procurement of goods and services variables, and human resource variables on the absorption of regional expenditure budgets in Malang.*

*This type of research is quantitative research. The population in this research were 20 regional work units in Malang in the form of Agency and Department. The sample of this research is the Regional Financial and Asset Agency, Planning Research and Development Agency, Education and Culture Department, Health Department, and Environment Department in Malang City with respondents occupying positions related to the budget, namely the authority of budgets users, officials making commitments, the technical executive officer of the activity, the official signing the payment order, and the treasurer of the expenditure.*

*The technical analysis used is multiple linear regression. The results of this research indicated that the human resources variable has a significant positive effect on the absorption of regional budgets. While the planning variable and the procurement of goods and services variable do not significantly influence the absorption capacity of the budget.*

---

## PENDAHULUAN

Instrumen akuntabilitas dari pengelolaan dan pelaksanaan program-program yang menggunakan dana publik yaitu anggaran. Akuntabilitas publik dapat tercipta melalui sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja. Anggaran daerah memiliki posisi yang penting dalam peningkatan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen utama mengenai kebijakan fiskal pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan daya serap anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Daya serap anggaran yang maksimal berimplikasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang terjadi pada setiap tahunnya di Indonesia yaitu mengenai daya serap anggaran. Daya serap anggaran dalam suatu organisasi akan meningkat apabila dalam satu periode penganggaran, melaksanakan program yang telah direncanakan.

Realisasi anggaran tercantum di dalam Laporan Realisasi Anggaran. Terdapat dua sudut pandang dalam pembahasan mengenai tingkat daya serap anggaran belanja daerah. Pandangan tersebut yaitu perbandingan mengenai realisasi anggaran akhir tahun yang dibandingkan dengan anggaran, dan tidak

proporsionalitasnya daya serap anggaran. Hilangnya manfaat belanja merupakan implikasi dari kegagalan target daya serap anggaran, sehingga terjadi iddle money karena adana yang dialokasikan tidak seluruhnya dimanfaatkan (Halim, 2014).

Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja daerah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019), daya serap anggaran belanja daerah di Indonesia selama periode 2010-2018 mengalami fluktuatif. Daya serap anggaran belanja daerah di Indonesia pada tahun 2015 merupakan posisi tertinggi dengan daya serap sebesar 103,41%. Daya serap anggaran belanja daerah terendah terjadi pada tahun 2016 dengan presentase sebesar 91,62%. Rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Indonesia pada tahun 2010-2018 adalah 97,38%.

Trend daya serap anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2018 mengalami fluktuatif, dengan rata-rata daya serap anggaran belanja daerah sebesar 100,67%. Presentase tingkat daya serap anggaran belanja terendah terjadi pada tahun 2016 dengan presentase sebesar 96,09%. Daya serap anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Timur tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan presentase sebesar 108,35%.

Trend daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang mengalami fluktuatif. Tahun 2010 Kota Malang memiliki daya serap anggaran tertinggi dengan presentase sebesar 114,62%. Sedangkan tingkat daya serap anggaran belanja daerah dengan presentase 92,83% pada tahun 2016 menjadi presentase terendah dari tahun 2010 sampai 2018. Rata-rata daya serap anggaran belanja daerah dengan presentase sebesar 92,83%. Rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2018 maka rata-rata daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang tahun 2010-2018 memiliki presentase yang lebih rendah.

Faktor perencanaan, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cerminan dari belanja daerah. Perencanaan yang baik maka akan memudahkan dalam tahap implementasi serta target dapat dicapai secara efektif (Mahmudi, 2010). Proses pengadaan barang dan jasa yang berjalan dengan lancar dan berkualitasnya sumber daya manusia maka target daya serap anggaran belanja daerah mudah dicapai.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang pertama penelitian (Kainde, 2013). Penelitian tersebut terkait dengan Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian tersebut yaitu realisasi belanja yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja yang dapat menggambarkan kurangnya efektifitas penggunaan anggaran. Perubahan kurs rupiah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan belanja pada Pemerintah Kota Bitung yang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Kedua penelitian yang dilakukan oleh (Rifai et al., 2016) tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB) yang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan penelitian tersebut adanya keterlambatan daya serap anggaran tidak dipengaruhi oleh faktor perencanaan,

faktor pelaksanaan, faktor regulasi, faktor desentralisasi, faktor sumber daya manusia, dan faktor koordinasi. Ketiga penelitian (Hasni & Basukianto, 2016) meneliti mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa 5 variabel berpengaruh positif terhadap serapan anggaran. 5 Variabel tersebut adalah faktor perencanaan anggaran dan kegiatan, faktor sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa, faktor regulasi, dan faktor proses pencairan dana. Keempat penelitian yang dilakukan oleh (Mutmainna & Iqbal, 2017) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan 5 variabel bebas yaitu pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi SDM, dan dokumen pengadaan. Berdasarkan penelitian yang menggunakan regresi linier berganda bahwa terdapat 4 variabel bebas yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yaitu pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi SDM, dan dokumen pengadaan. Variabel pencatatan administrasi di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Kelima penelitian oleh (Putri et al., 2017) meneliti mengenai Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). Menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil bahwa variabel perencanaan anggaran, variabel kualitas sumber daya manusia, dan variabel komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan. Keenam penelitian (Nugroho & Alfarisi, 2017) meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor perencanaan, pelaksanaan anggaran dan koordinasi dengan instansi lain berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran instansi pemerintah. Faktor pengadaan barang dan jasa dan faktor sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan. Ketujuh penelitian oleh (Elim et al., 2018) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. Menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi secara simultan dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja pada OPD di Kota Kupang. Kedelapan penelitian oleh (Salwah, 2019) meneliti tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan analisis linier regresi berganda yang menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sedangkan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Kesembilan penelitian yang dilakukan oleh (Julfiansyah, 2013) mengenai Pengaruh Investasi PMA/PMDN Dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Kesepuluh penelitian (Hidayat & Nalle, 2017) yang berjudul Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015 bahwa dalam segi belanja pemerintah selalu mengalami kenaikan yang menggambarkan banyaknya kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah. Kesebelas penelitian (Ritmadanti Jatmiko, 2016) yang berjudul Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur, analisis dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa variabel dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kedua belas penelitian (Jaenuri, 2014) yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro Dan Jombang Tahun 2010-2014 yang menggunakan beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi PAD, rasio efektifitas PAD, rasio aktivitas (keserasian) belanja operasional dan belanja modal. Ketiga belas penelitian (Lestari, 2009) tentang Analisa Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kediri Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja. Terdapat beberapa fungsi dalam anggaran sektor publik yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi (Mardiasmo, 2002). Keempat belas penelitian (Ramadhani, 2013) memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Tarakan berdasarkan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah tahun 2010-2015.

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya penelitian mengenai daya serap belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran belanja daerah. Pengembangan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian yang menggunakan sampel 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Malang serta pada tahun penelitian.

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui tingkat daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang pada tahun 2010-2018 dan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya manusia terhadap daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang.

## **METODE PENELITIAN**

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya manusia. Dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah, tahapan penganggaran merupakan tahapan yang memiliki peranan penting di siklus perencanaan dan pengendalian. Anggaran bagi pemerintah daerah memiliki arti penting, karena dengan melalui anggaran pemerintah daerah dapat mengarahkan, menjamin



pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, adanya keterbatasan sumber daya, pilihan, dan *trade offs*, meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah bertanggungjawab. Anggaran daerah merupakan fasilitas dalam mencapai tujuan organisasi yaitu *managerial plan for action*. Terdapat dua jenis anggaran sektor publik yaitu anggaran operasional dan anggaran modal.

Populasi dalam penelitian ini adalah 20 Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kota Malang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbentuk Badan dan Dinas
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki realisasi belanja tahun 2017-2019 diatas rata-rata realisasi belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Malang tahun 2017-2019.

Didapatkan 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai kriteria dan yang bersedia menjadi responden yaitu:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kota Malang
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang
4. Dinas Kesehatan Kota Malang
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Pemerintah Kota Malang melakukan *merger* beberapa Dinas. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang yang di *merger* dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sekarang dikenal dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Dinas tersebut dalam penelitian ini tidak bersedia menjadi sampel, sehingga terdapat 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria dan bersedia menjadi sampel dengan responden yang menduduki jabatan di bidang anggaran yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 31 responden.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, menggunakan metode kuisisioner dan metode dokumentasi. Metode kuisisioner dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner ke Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Malang. Metode dokumentasi dengan mencatat dan mengumpulkan data-data yang tercatat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam visualisasi APBD dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pengukuran variabel penelitian ini menggunakan skala likert 5 point. Pembobotan skala likert, yaitu :

**Tabel 1. Kategori dan pembobotan skala likert**

Kategori	Skor/Nilai
----------	------------

Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu data primer dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, yang diolah menggunakan program Statistical Package for the Sosial Sciences (SPSS). Analisis tingkat daya serap anggaran dengan menggunakan rasio efektifitas.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis yang kedua dengan menggunakan analisis regresi berganda. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Daya Serap Anggaran Belanja,
- a = Konstanta,
- b = Koefisien Regresi Berganda,
- X<sub>1</sub> = Perencanaan,
- X<sub>2</sub> = Pengadaan Barang dan Jasa,
- X<sub>3</sub> = Sumber Daya Manusia,
- e = error.

Penelitian ini menggunakan uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas untuk mendeteksi pernyataan pada kuisisioner yang harus ditukar/dibuang karena tidak relevan, apabila memiliki R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid dan apabila memiliki R hitung kurang dari R tabel maka instrument dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas untuk mengetahui hasil suatu pengetahuan agar dapat dipercaya apabila jawaban dari responden terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari maktu ke waktu maka kuisisioner tersebut dikatakan reliabel atau handal. Tingkat reliabilitas terhadap koefisien korelasi, yaitu :

**Tabel 2. Nilai Tingkat Reliabilitas Cronbach's Alpa**

Nilai Cronbach's Alpa	Tingkat Reliabilitas
0,8 – 1	Sangat Tinggi
0,6 – 0,8	Tinggi
0,4 – 0,6	Cukup
0,2 – 0,4	Rendah
0,0 – 0,2	Sangat Rendah

Uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas untuk mengetahui data memiliki distribusi normal. Uji normalitas eror dapat menggunakan uji Jarque-Bera. Hasil uji Jarque-Bera harus memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data

terdistribusi dengan normal. Uji multikolinearitas untuk mengetahui terjadi hubungan linier antar variabel-variabel independen. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) atau *tolerance* ( $1/VIF$ ). Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui kondisi di dalam varian gangguan/eror dari model regresi yang bersifat tidak konstan. Masalah adanya heteroskedastisitas dapat diuji melalui uji glejser. Apabila masing-masing variabel independen memiliki nilai lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi untuk mengetahui data pada periode saat ini dipengaruhi oleh data pada periode sebelumnya. Adanya autokorelasi dapat diuji menggunakan uji durbin-watson. Uji durbin-watson digunakan apabila jumlah observasi dibawah 100.

Pengujian uji hipotesis dengan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Variabel-variabel independen dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen apabila memiliki nilai koefisien yang mendekati satu. Uji F-statistik digunakan untuk menguji keberadaan parameter regresi secara simultan/serentak, hipotesis diterima apabila nilai Probabilitas F-statistik  $< \alpha$  (0,05). Uji t-statistik untuk menguji parameter secara parsial atau secara sendiri-sendiri dengan menggunakan tarif nyata  $\alpha$  sebesar 5%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambar 1. Peta Kota Malang



Sumber: BPS Kota Malang, 2020

Kota Malang memiliki 5 kecamatan yaitu kecamatan klojen, kecamatan blimbing, kecamatan kedungkandang, kecamatan lowokwaru, dan kecamatan sukun. Kota Malang merupakan bagian dari satu kesatuan yang lebih dikenal dengan Malang Raya. Kota Malang dikenal dengan kota pendidikan yang memiliki banyak universitas.

Pemerintah Daerah Kota Malang memiliki 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbentuk Badan dan Dinas. 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Kota Malang yang berbentuk Badan yaitu Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

Terdapat 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Malang yang berbentuk Dinas yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Pangan dan Pertanian Kota Malang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Malang

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang tahun 2017-2019 memiliki rata-rata daya serap anggaran belanja sebesar 71,19%. Daya serap anggaran belanja tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan prosentase sebesar 78,59%. Pada tahun 2019 merupakan daya serap anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terendah selama tiga tahun prosentase sebesar 64,46%. Badan Keuangan dan Aset Daerah (selaku PPKD) pada tahun 2017-2019 memiliki rata-rata daya serap anggaran belanja sebesar 56,66%. Pada tahun 2019 merupakan tahun dengan daya serap anggaran terendah pada periode 2017-2019 dengan prosentase sebesar 16,05%, dan pada tahun 2017 daya serap anggaran tertinggi dengan prosentase sebesar 87,47%.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang memiliki daya serap anggaran tertinggi yang terjadi pada tahun 2019 dengan prosentase sebesar 89,14%. Prosentase daya serap anggaran belanja terendah pada tahun 2018 sebesar 83,28% dengan rata-rata daya serap anggaran belanja tahun 2017-2019 sebesar 86,43%. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang pada tahun 2017-2019 memiliki rata-rata daya serap anggaran sebesar 89,88%. Pada tahun 2019 merupakan daya serap anggaran belanja tertinggi sebesar 98,52%. Pada tahun 2017 menjadi daya serap anggaran belanja terendah dengan prosentase sebesar 79,63%.

Dinas Kesehatan Kota Malang pada tahun 2017-2018 memiliki rata-rata daya serap anggaran belanja sebesar 82,73%. Pada tahun 2017 merupakan daya serap anggaran belanja tertinggi sebesar 85,01%. Daya serap anggaran belanja terendah pada tahun 2018 dengan prosentase sebesar 78,54%.

Rata-rata daya serap anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup periode 2017-2019 sebesar 90,54%. Daya serap anggaran belanja tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan prosentase sebesar 91,99%, tahun 2018 merupakan daya serap anggaran belanja terendah dengan prosentase sebesar 88,83%.

Dalam laporan realisasi anggaran belanja daerah di Kota Malang pada tahun 2010 merupakan realisasi anggaran belanja yang tertinggi sebesar



114,62% periode 2010-2018. Realisasi anggaran belanja daerah yang terendah terjadi pada tahun 2016, yang mencapai angka sebesar 92,83% periode 2010-2018. Rata-rata realisasi anggaran belanja daerah di Kota Malang pada tahun 2010-2018 sebesar 99,47%.

Olahan uji validitas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini didapatkan r tabel sebesar 0,3550. Berdasarkan hasil olahan uji validitas, seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki r hitung lebih besar daripada r tabel. Sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen dalam penelitian ini valid. Hasil olahan uji reliabilitas, menunjukkan bahwa variabel perencanaan, pengadaan barang dan jasa, daya serap anggaran memiliki nilai lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dinyatakan bahwa reliabel. Sedangkan sumber daya manusia memiliki nilai 0,595 maka instrumen tersebut cukup reliabel.

**Tabel 3. Hasil Olahan Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Perencanaan (X1)	0,636	0,6	Reliabel
Pengadaan Barang dan Jasa (X2)	0,733	0,6	Reliabel
Sumber Daya Manusia (X3)	0,595	0,6	Cukup Reliabel
Daya Serap Anggaran Belanja (Y)	0,737	0,6	Reliabel

Sumber: data diolah SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test didapatkan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,350 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Pengujian selanjutnya yaitu menguji multikolinieritas, uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui adanya multikolinieritas antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) atau *tolerance* (1/VIF). Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 dan *tolerance* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas didapatkan nilai VIF kurang dari 10 dari masing-masing variabel maka data terbebas dari multikolinieritas.

**Tabel 4. Hasil Olahan Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Perencanaan (X1)	0,936	1.068	Bebas Multikolinieritas

Pengadaan Barang dan Jasa (X2)	0,836	1.197	Bebas Multikolinearitas
Sumber Daya Manusia (X3)	0,843	1.187	Bebas Multikolinearitas

Sumber: data diolah SPSS, 2020

Sedangkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser diperoleh nilai sig dari masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 5. Hasil Olahan Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Keterangan
Perencanaan (X1)	0,355	Bebas Heterokedastisitas
Pengadaan Barang dan Jasa (X2)	0,574	Bebas Heterokedastisitas
Sumber Daya Manusia (X3)	0,207	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: data diolah SPS, 2020

Berdasarkan hasil olahan uji Durbin-Watson didapatkan  $d=1,560$  dengan nilai  $dL=1,229$ , nilai  $dU=1,650$ , sehingga  $dL < d < dU$  yang menunjukkan hasil uji Durbin-Watson tidak menghasilkan hasil yang akurat (*inconclusive*), sehingga memerlukan adanya penanganan. Penanganan autokorelasi didapatkan nilai statistik uji Durbin-Watson dengan  $d=1,857$ , nilai  $dU=1,650$ ,  $4-dU=2,350$  sehingga  $dU < d < 4-dU$ . Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran asumsi non-autokorelasi berhasil ditangani.

Berdasarkan pada hasil olahan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) nilai *R square* 0,306 maka variabel perencanaan, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia menjelaskan variabel daya serap anggaran belanja sebesar 30,6%. Sisanya sebesar 60,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hasil olahan F-statistik dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5%, yang diperoleh F-hitung 3,963 lebih besar dari F-tabel 2,95 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,18 lebih besar dari 0,05 dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel perencanaan, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel daya serap anggaran belanja.

**Tabel 6. Hasil Olahan Uji t-Statistik**

Variabel	Koefisien	t	Sig
Konstanta	5,995		
Perencanaan (X1)	0,081	0,391	0,699
Pengadaan Barang dan Jasa (X2)	0,029	0,142	0,888

Sumber Daya Manusia (X3)	0,409	3.011	0,006
-----------------------------	-------	-------	-------

Sumber: data diolah SPSS, 2020

Hasil olahan uji t-Statistik dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,995 + 0,081 X1 + 0,029 X2 + 0,409 X3 \dots\dots\dots(2)$$

Berdasarkan persamaan regresi linier diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta positif pada seluruh variabel maka persamaan regresi berganda memiliki hubungan yang searah, artinya daya serap anggaran akan meningkat seiring dengan meningkatkannya perencanaan (X1), pengadaan barang dan jasa (X2), sumber daya manusia (X3). Nilai konstanta bernilai 5,995 memiliki arti bahwa variabel X dalam model ini bernilai nol, variabel Y dapat terjadi sebesar nilai konstanta.

Perencanaan anggaran memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,81% dengan nilai t-statistik sebesar 0,391 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,05183 dan nilai signifikansi sebesar 0,699 lebih besar dari 0,05 dapat dinyatakan bahwa variabel perencanaan tidak berpengaruh signifikan. Pengadaan barang dan jasa memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 9,29% dengan nilai t-statistik sebesar 0,412 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,05183 dan nilai signifikansi sebesar 0,888 lebih besar dari 0,05 dapat dinyatakan bahwa variabel pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan.

Sumber daya manusia memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 40,9% dengan nilai t-statistik sebesar 3,011 lebih besar dari t-hitung sebesar 2,05183 dan nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 dapat dinyatakan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh dan signifikan terhadap daya serap anggaran belanja. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kemampuan sumber daya manusia sebesar 1% maka daya serap anggaran belanja meningkat sebesar 40,9%. Menurunnya kemampuan sumber daya manusia sebesar 1% maka daya serap anggaran belanja menurun sebesar 40,9%.

**PEMBAHASAN**

Perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap daya serap anggaran belanja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rifai et al., 2016) bahwa perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan daya serap anggaran. Penelitian (Salwah, 2019) menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Nugroho & Alfarisi, 2017) yang menunjukkan bahwa faktor pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Sumber daya manusia berpengaruh terhadap daya serap anggaran. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia dalam mengelola APBD yang berimplikasi pada meningkatnya daya serap anggaran belanja daerah. Berdasarkan pada teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produktifitas kerja yaitu kemampuan fisik dan kualitas

karyawan, supra sarana, dan sarana pendukung (Ndraha, 1999) Apabila produktifitas meningkat maka akan berimplikasi terhadap peningkatan daya serap anggaran belanja. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Hasni & Basukianto, 2016) bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif signifikan terhadap serapan anggaran. Penelitian (Putri et al., 2017) bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan. Penelitian yang dilakukan oleh (Elim et al., 2018) menunjukkan variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan belanja pada OPD di Kota Kupang.

## **KESIMPULAN**

Daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang mengalami fluktuatif dari tahun 2010-2018 dengan rata-rata daya serap anggaran belanja sebesar 99,47%. Berdasarkan dengan hasil uji dapat dinyatakan bahwa perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang. Daya serap anggaran belanja daerah di Kota Malang dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang bersifat positif signifikan.

Adanya kendala dalam variabel perencanaan anggaran sesuai dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu Apabila dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat anggaran yang tidak sesuai atau anggaran minim yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan maka membutuhkan telaah atau nota dinas ke Pejabat Pembuat Komitmen sehingga adanya penyusunan ulang. Akibat dari adanya perubahan anggaran membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kegiatan akan mundur dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan anggaran telah sesuai dengan teori namun pada implementasi terdapat kendala. Adanya perencanaan anggaran yang baik belum tentu menjadikan daya serap anggaran belanja daerah menjadi baik. Hal tersebut dikarenakan adanya dalam pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan sehingga akan berakibat pada rendahnya daya serap anggaran belanja daerah.

Terdapat kendala dalam hal pengadaan barang dan jasa, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini, yaitu pengadaan barang dan jasa terdapat kendala dalam prosedur pengadaan dan standart pelelangan. Dalam hal prosedur, terdapatnya kendala mengenai adanya barang yang sulit dicari sehingga melalui beberapa perantara penyedia barang. Kemudahan dalam pengadaan barang dan jasa yang sudah diterapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui *e-katalog*, sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas. Tidak semua barang yang dibutuhkan tersedia melalui *e-katalog*. Keterbatasan barang yang tersedia mengakibatkan pengadaan barang dan jasa secara konvensional memerlukan survey dan Harga Perkiraan Sendiri. Adanya kontrak dengan penyedia barang yang berada diluar kota dan pengadaan secara konvensional berimplikasi pada panjangnya birokrasi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan melalui *e-katalog*.

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu data laporn realisasi anggaran belanja yang tidak mudah diperoleh, topik dan kajian mengenai

daya serap anggaran belanja yang belum variatif, adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menolak menjadi sampel penelitian karena topik dalam penelitian ini mengenai realisasi anggaran belanja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Textbooks:

- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Ndraha, T. (1999). *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta.

### Jurnal

- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. D. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit*, 3(2), 46–56.
- Hasni, N. T., & Basukianto. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. *Telaan Manajemen*, 13, 33–34. ???
- Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 71. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.4647>
- Jaenuri. (2014). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH BOJONEGORO DAN JOMBANG TAHUN 2010-2014. *Telematics and Informatics*, 19(1), 27–40. <https://doi.org/10.1177/1742766510373715>
- Julfiansyah, D. (2013). Pengaruh Investasi PMA / PMDN Dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 227. <https://doi.org/10.22219/jep.v11i2.3742>
- Kainde, C. (2013). Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. *Emba*, 1(3), 393–400.
- Lestari, W. A. (2009). Analisa Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kediri Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 151. <https://doi.org/10.22219/jep.v7i2.3594>
- Nugroho, R., & Alfarisi, S. (2017). Penyerapan Anggaran Quartal Iv Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK*, 10(1), 22–37.
- Putri, kadek M. R., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen



- Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Ramadhani, F. R. (2013). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati M., R. S. (2016). ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN DAYA SERAP ANGGARAN (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1–10. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i01.p01>
- Ritmadanti Jatmiko, P. E. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 46. <https://doi.org/10.22219/jep.v14i1.3843>
- Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 09(November 2019), 164–182.

## Laporan

- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. 2020. *Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Per SKPD Tahun Anggaran 2017*. Malang: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. 2020. *Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Per SKPD Tahun Anggaran 2018*. Malang: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. 2020. *Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Per SKPD Tahun Anggaran 2019*. Malang: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

## Website

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. [diakses pada 10 Juli 2019].